



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA BLITAR

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kami Panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Petunjuknya bahwa Dinas Lingkungan Hidup telah selesai menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup pada Pemerintah Kota Blitar Tahun 2024 wajib dilaksanakan sesuai dengan amanat Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 109 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai bentuk tanggungjawab dalam akuntabilitas, transparansi dan pencapaian kinerja yang mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup tahun 2021 – 2026 dan merupakan gambaran dari hasil-hasil yang dicapai berdasarkan kinerja sasaran strategis yang didukung oleh kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang - bidang pada Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan program masing-masing.

Dengan diterbitkannya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024 ini diharapkan adanya suatu langkah yang nyata dalam meningkatkan Kinerja Lembaga Dinas Lingkungan Hidup sebagai instansi yang berwenang dalam pengelolaan lingkungan hidup. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2024 ini tentu masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan saran-saran untuk penyempurnaannya..

Demikian, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar Tahun 2024 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Blitar, 28 Februari 2025

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Blitar



Ir. JAJUK INDIHARTATI
Pembina Utama Muda
NIP. 196612311993032047

EXECUTIVE SUMMARY

Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 109 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup.

Untuk menjalankan tugas pokoknya, Dinas Lingkungan Hidup menjalankan fungsi sebagai berikut :

1. Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis urusan lingkungan hidup berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah daerah;
2. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program unit kerja secara terpadu;
3. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan penyusunan program / kegiatan sekretariat;
4. Fasilitasi dan pengkoordinasian penyusunan standar operasional prosedur (SOP) masing-masing bidang dan standar pelayanan publik (SPP)
5. Pengkoordinasian dan penyusunan perubahan rencana strategis (renstra), rencana kerja (RENJA) dan rencana kinerja tahunan (RKT);
6. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana kerja anggaran (RKA);
7. Pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan dokumen perubahan pelaksanaan anggaran (DPPA);
8. Pengkoordinasian dan fasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi bidang-bidang di lingkungan dinas;
9. Pengkoordinasian pengusulan penataan organisasi, tata laksana dan produk hukum lainnya;
10. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian pelayanan administrasi umum, kepegawaian, kearsipan dan penatausahaan keuangan;
11. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan administrasi perjalanan dinas, tugas-tugas keprotokolan dan kehumasan;
12. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan urusan rumah tangga dan tata usaha dinas;
13. Fasilitasi penyusunan penetapan kinerja (PK) dan perubahan penetapan kinerja;
14. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan administrasi perlengkapan, sarana prasarana, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas;
15. Pengkoordinasian dan pelaksanaan penatausahaan keuangan;
16. Fasilitasi pelaksanaan perbendaharaan belanja;
17. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
18. Fasilitasi pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi;
19. Fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka

- penyelenggaraan tugas dan fungsi;
20. Pengkoordinasian dan fasilitasi penyusunan laporan dan kinerja pelaksanaan urusan pemerintah;
 21. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang lingkungan hidup.;
 22. Fasilitasi pelaksanaan pengukuran pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
 23. Pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 24. Fasilitasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP);
 25. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan dinas lingkungan hidup secara berkala melalui sub domain website pemerintah daerah;
 26. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pelaksanaan informasi dan publikasi; dan
 27. Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam menjalankan tugasnya, terdapat isu-isu strategis di bidang lingkungan hidup diantaranya kondisi pengelolaan sampah yang belum optimal, luasan Ruang Terbuka Hijau publik belum memenuhi ketentuan 20% dari total luas wilayah, meningkatnya suhu bumi akibat pemanasan global yang dipicu oleh meningkatnya emisi Gas Rumah Kaca, nilai IKLH yang relatif masih rendah, terutama untuk Indeks Kualitas Air dan Indeks Tutupan Lahan, dan juga isu regulasi lingkungan.

Untuk menjawab isu-isu strategis tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar telah menyusun Rencana Strategis maupun Rencana Kinerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan yaitu meningkatnya kualitas lingkungan hidup, serta meningkatnya tata kelola perangkat daerah. Untuk mencapai sasaran strategis yang menjadi indikator kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup tersebut, maka disusun program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja utama dan program kegiatan selama tahun 2024, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menguraikan pengukuran capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 dari 2 tujuan dan 2 sasaran. Untuk tujuan yaitu meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan meningkatnya tata kelola perangkat daerah. Sedangkan untuk sasaran yaitu meningkatnya lingkungan yang bersih dan hijau, dan meningkatnya kinerja perangkat daerah.

Dari 2 tujuan dan 2 sasaran tersebut, terdapat 10 (sepuluh) indikator kinerja yang mendukung terwujudnya pencapaian sasaran serta tingkat efisiensinya, yang mana pada tahun 2024 tingkat efisiensi dalam pencapaian kinerja sasaran belum seluruhnya efisien, karena terdapat empat indikator yang memiliki rasio kurang dari 1, dengan rincian sebagai berikut : pencapaian indikator Indeks kualitas air ketersediaan rasio efisiensi sebesar 0,89 yang berarti untuk pencapaian target kinerja sebesar 82,78% dibutuhkan realisasi anggaran sebesar 93,02% dan dikategorikan TIDAK EFISIEN. Indikator Indeks kualitas udara ketersediaan rasio efisiensi sebesar 1,05 yang berarti untuk

pencapaian target kinerja sebesar 103,89% dibutuhkan realisasi anggaran sebesar 98,91% dan dikategorikan EFISIEN. Indikator Indeks kualitas lahan ketersediaan rasio efisiensi sebesar 0,67 yang berarti untuk pencapaian target kinerja sebesar 60,70% dibutuhkan realisasi anggaran sebesar 90,78% dan dikategorikan TIDAK EFISIEN. Indikator Persentase capaian layanan persampahan ketersediaan rasio efisiensi sebesar 1,01 yang berarti untuk pencapaian target kinerja sebesar 100,24% dibutuhkan realisasi anggaran sebesar 99,51% dan dikategorikan EFISIEN. Indikator Persentase badan air yang memenuhi baku mutu ketersediaan rasio efisiensi sebesar 0,34 yang berarti untuk pencapaian target kinerja sebesar 32,02% dibutuhkan realisasi anggaran sebesar 93,02% dan dikategorikan TIDAK EFISIEN. Indikator Persentase kawasan yang memenuhi baku mutu udara ketersediaan rasio efisiensi sebesar 1,01 yang berarti untuk pencapaian target kinerja sebesar 100% dibutuhkan realisasi anggaran sebesar 98,91% dan dikategorikan EFISIEN. Indikator Persentase RTH yang terkelola ketersediaan rasio efisiensi sebesar 1,10 yang berarti untuk pencapaian target kinerja sebesar 100% dibutuhkan realisasi anggaran sebesar 90,78% dan dikategorikan EFISIEN. Indikator Persentase sampah terkelola ketersediaan rasio efisiensi sebesar 1,01 yang berarti untuk pencapaian target kinerja sebesar 100,24% dibutuhkan realisasi anggaran sebesar 99,52% dan dikategorikan EFISIEN. Indikator Persentase usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang terkelola dengan baik ketersediaan rasio efisiensi sebesar 1,09 yang berarti untuk pencapaian target kinerja sebesar 100,01% dibutuhkan realisasi anggaran sebesar 91,44% dan dikategorikan EFISIEN. Serta pencapaian indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah ketersediaan rasio efisiensi sebesar 0,99 yang berarti untuk pencapaian target kinerja sebesar 97,94% dibutuhkan realisasi anggaran sebesar 99,36% dan dikategorikan TIDAK EFISIEN.

Keterkaitan dalam pencapaian kinerja utama dalam mewujudkan tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar Tahun 2024 dapat dikatakan baik walaupun masih dijumpai banyak kendala/hambatan dalam pelaksanaannya. Untuk pelaksanaan mendatang perlu ditingkatkan sehingga diperoleh hasil yang lebih baik.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

KATA PENGANTAR ii

EXECUTIVE SUMMARY iii

DAFTAR ISI vi

BAB I PENDAHULUAN 1

 A. Latar Belakang 1

 B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi 1

 C. Maksud dan Tujuan 5

 D. Dasar Hukum 5

 E. Aspek – Aspek Strategis 7

 F. Isu – Isu Strategis 8

BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA 10

 A. Rencana Strategis 10

 B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 15

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 17

 A. Pengukuran Capaian Kinerja / Sasaran 17

 1. Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Target dan Realisasi tahun 2024..... 18

 2. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2023 – 2024..... 28

 3. Perbandingan realisasi Kinerja s.d akhir Periode Renstra..... 29

 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional atau Realisasi Kabupaten/Kota 30

 B. Akuntabilitas Keuangan (Cost per Outcome) 31

 1. Alokasi Anggaran Tiap Sasaran 31

 2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran 32

 3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 44

 C. Prestasi / Penghargaan 46

BAB IV PENUTUP 48

 A. Kesimpulan 48

 B. Langkah Perbaikan 49

Lampiran-Lampiran :

- 1. Matriks Renstra Perubahan 2021-2026
- 2. Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar Tahun 2024
- 3. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024
- 4. Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah 2024

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD).

Dalam penyusunannya, LKjIP berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Pertanggungjawaban kinerja Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021-2026. Penyusunan LKjIP menyajikan informasi kinerja yang terukur atas pencapaian tujuan dan sasaran RENSTRA Perangkat Daerah, realisasi pencapaian indikator tujuan dan sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja. Serta sebagai evaluasi atas kinerja organisasi periode akhir masa jabatan walikota sebagaimana janji politik yang wajib dicapai di akhir masa jabatan.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 109 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar menjalankan fungsi sebagai berikut :

1. Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis urusan lingkungan hidup berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah daerah;
2. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program unit kerja secara terpadu;
3. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan penyusunan program / kegiatan sekretariat;
4. Fasilitasi dan pengkoordinasian penyusunan standar operasional prosedur (SOP) masing-masing bidang dan standar pelayanan publik (SPP)
5. Pengkoordinasian dan penyusunan perubahan rencana strategis (renstra), rencana kerja (RENJA) dan rencana kinerja tahunan (RKT);
6. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana kerja anggaran (RKA);
7. Pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan dokumen perubahan pelaksanaan anggaran (DPPA);
8. Pengkoordinasian dan fasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi bidang-bidang di lingkungan dinas;
9. Pengkoordinasian pengusulan penataan organisasi, tata laksana dan produk hukum lainnya;
10. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian pelayanan administrasi umum, kepegawaian, kearsipan dan penatausahaan keuangan;
11. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan administrasi perjalanan dinas, tugas-tugas keprotokolan dan kehumasan;
12. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan urusan rumah tangga dan tata usaha dinas;
13. Fasilitasi penyusunan penetapan kinerja (PK) dan perubahan penetapan kinerja;
14. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan administrasi perlengkapan, sarana prasarana, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas;
15. Pengkoordinasian dan pelaksanaan penatausahaan keuangan;
16. Fasilitasi pelaksanaan perbendaharaan belanja;
17. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
18. Fasilitasi pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi;
19. Fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi;
20. Pengkoordinasian dan fasilitasi penyusunan laporan dan kinerja pelaksanaan urusan pemerintah;
21. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang lingkungan hidup.;
22. Fasilitasi pelaksanaan pengukuran pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;

23. Pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
24. Fasilitasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP);
25. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan dinas lingkungan hidup secara berkala melalui sub domain website pemerintah daerah;
26. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pelaksanaan informasi dan publikasi; dan
27. Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Pejabat Fungsional, dan Pelaksana.

Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertugas melaksanakan kegiatan koordinasi internal dan eksternal, penatausahaan dan penatalaksanaan urusan kantor secara umum, pengelolaan administrasi dan pembinaan pegawai perencanaan program serta penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan dalam rangka memperlancar mekanisme organisasi. Untuk membantu tugas – tugas dari Sekretariat maka dibantu oleh sub bagian-bagian.

- Sub Bagian Program dan Kepegawaian;
- Sub Bagian Umum dan Keuangan.

Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Blitar terdiri atas 3 bidang, yaitu :

1. Bidang Penataan, Penaatan, dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan;
2. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3; dan
3. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;

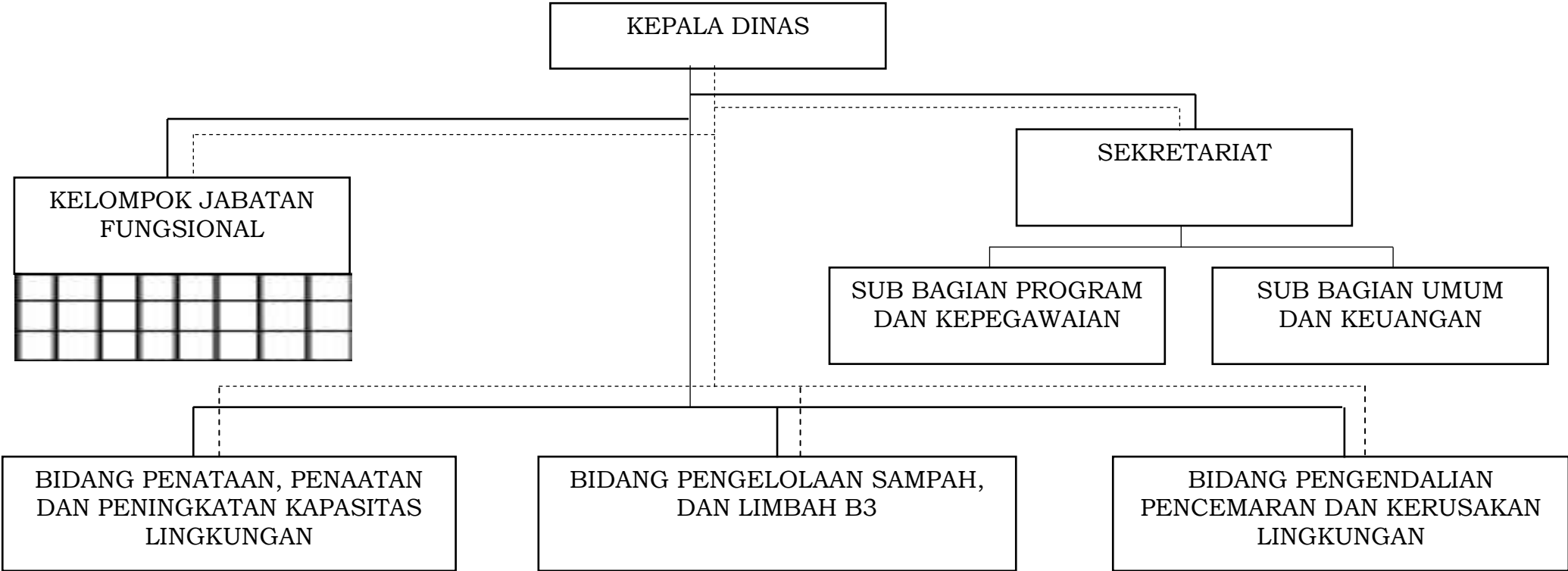
Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan dipimpin oleh Kepala Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan atau disingkat dengan P3KL, yang bertugas merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan Tata Lingkungan.

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dipimpin oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 yang bertugas merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di Bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3.

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dipimpin oleh Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang bertugas merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

Untuk memberikan gambaran pola koordinasi antar jabatan pada Dinas Lingkungan Hidup dapat digambarkan melalui Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar sebagai berikut:

Gambar 1.1 SUSUNAN ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP



C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan LKJIP adalah implementasi rangkaian penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sedangkan tujuan dari penyusunan LKJIP adalah :

1. Mendorong OPD untuk dapat menjalankan tugas Pemerintahan dan Pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan pada Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.
2. Menjadikan pelaksanaan kinerja OPD akuntabel, sehingga dapat mewujudkan program kegiatan yang efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak - pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja OPD.
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat dan *stakeholders* terhadap penyelenggaraan Pemerintahan khususnya terhadap DLH.
5. Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan bahan perencanaan ke depan agar capaian kinerja menjadi lebih baik
6. Serta sebagai media untuk mengukur akuntabilitas keuangan.

D. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar tahun 2024 mengacu kepada :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama diLingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

- tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
 12. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Blitar Tahun 2005 - 2025;
 13. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026;
 14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 15. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2024;
 17. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 18. Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 19. Peraturan Walikota Blitar Nomor 99 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022 – 2026;
 20. Peraturan Walikota Blitar Nomor 109 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup;
 21. Peraturan Walikota Blitar Nomor 40 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
 22. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026.
 23. Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2024;
 24. Peraturan Walikota Blitar Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun 2024;

25. Peraturan Walikota Blitar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
26. Peraturan Walikota Blitar nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
27. Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
28. Peraturan Walikota Blitar Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
29. Peraturan Walikota Blitar Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2024;
30. Peraturan Walikota Blitar Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
31. Peraturan Walikota Blitar Nomor 52 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2024.

E. ASPEK – ASPEK STRATEGIS

1. Lingkungan Internal

a. Kekuatan

- 1). Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 109 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup ;
- 2). Adanya dukungan Sarana dan Prasarana operasional pengelolaan lingkungan dan persampahan;
- 3). Jumlah personel cukup memadai;
- 4). Dukungan dana operasional untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Dinas lingkungan hidup ;
- 5). Suasana kerja dan lingkungan yang cukup kondusif;
- 6). Terjalinnnya sistem koordinasi baik internal maupaun eksternal yang harmonis;
- 7). Kondisi geografis terutama kemiringan tanah yang memungkinkan limbah cair dari rumah tangga dan industri diolah pada suatu instalasi pengolahan limbah;
- 8). Penerapan otonomi daerah yang memberi peluang kepada daerah untuk

berinovasi tanpa harus menunggu juklak/juknis pusat untuk mengembangkan daerahnya; dan

- 9). Keberadaan Sumber Daya Air terutama air permukaan, relatif tetap karena mengikuti daur hidrologi.

b. Kelemahan

- 1). Belum lengkapnya tugas pokok fungsi pejabat fungsional di lingkup lingkungan hidup; dan
- 2). Masih sedikitnya jumlah pejabat fungsional terkait pengawasan, penyuluhan, dan penataan lingkungan hidup

2. Lingkungan Eksternal

a. Peluang

- 1). Terjalannya *networking* yang kondusif antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kota Blitar;
- 2). Masyarakat Kota Blitar yang semakin "kritis" untuk mengikuti perkembangan pembangunan Kota Blitar;
- 3). Lingkungan masyarakat Kota Blitar yang semakin kondusif;
- 4). Terjalin kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;

b. Kendala

- 1). Masih ada beberapa masyarakat yang kurang memiliki kesadaran terhadap lingkungan hidup, khususnya terkait buang sampah sembarangan.

F. ISU – ISU STRATEGIS

Isu strategis lingkungan hidup adalah :

1. Kondisi pengelolaan sampah yang belum optimal. Terutama dari sisi pengurangan sampah dari sumbernya hingga dicapai kondisi *zero waste*. Hal ini dikarenakan antara lain :
 - ✓ Pemenuhan rasio ketersediaan TPS berdasarkan satuan jumlah penduduk.
 - ✓ Penanganan TPA yang belum efektif, yang disebabkan oleh terbatasnya lahan TPA.
 - ✓ Peningkatan jumlah penduduk mengakibatkan peningkatan jumlah volume sampah yang cukup pesat.
 - ✓ Pengelolaan sampah berbasis 3R belum maksimal dilakukan di kawasan – kawasan permukiman.
2. Luasan Ruang Terbuka Hijau Publik belum memenuhi ketentuan 20% dari total luas wilayah. Sedangkan kondisi saat ini di Kota Blitar, RTH publik masih berkisar 16,27%, termasuk Kota

Blitar belum memiliki hutan kota. Ruang Terbuka Hijau selain sebagai peresapan air juga mampu mereduksi emisi dari kendaraan maupun industri.

3. Meningkatnya suhu bumi akibat pemanasan global yang dipicu oleh meningkatnya emisi Gas Rumah Kaca. Meningkatnya emisi Gas Rumah Kaca ini salah satu pemicu utamanya adalah pertambahan jumlah penduduk tiap tahun. Hal ini menjadi permasalahan bersama seluruh sektor untuk dapat menurunkan emisi GRK melalui aksi mitigasi seperti yang tertuang pada Rencana Aksi Daerah.
4. Nilai IKLH yang relatif masih rendah, terutama untuk Indeks Kualitas Air dan Indeks Tutupan Lahan. Rendahnya nilai Indeks Kualitas Air diakibatkan karena adanya limbah industri tahu, limbah domestik, dan limbah dari peternakan berperan besar mempengaruhi kualitas badan air. Sedangkan terjadinya penurunan nilai Indeks Tutupan Lahan di Tahun 2024 dikarenakan adanya perubahan metode perhitungan IKL dengan metode deleniasi tutupan lahan. Selain itu, penilaian kualitas lahan tidak hanya berdasarkan pada luas ruang terbuka hijau (RTH) namun pada deleniasi pohon yang bersifat keras. Saat ini alih fungsi lahan menyebabkan berkurangnya pohon keras sehingga mempengaruhi nilai dari Indeks Kualitas Lahan.
5. Isu regulasi lingkungan
Perlu penegasan implementasi kebijakan tata ruang wilayah dan tata guna lahan, kebijakan kebersihan dan ketertiban dan kebijakan pro lingkungan yang berkelanjutan.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Renstra Perangkat Daerah merupakan produk atau dokumen perencanaan pembangunan daerah yang menjadi acuan bagi dinas, badan atau unit kerja pemerintah daerah dan pelaksanaan tugas pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Agar peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan secara efektif dan optimal, maka dalam proses formulasi dan Penyusunan perubahan Renstra PD perlu melibatkan para pemangku kepentingan untuk memastikan terdapatnya perspektif yang menyeluruh atas isu yang dihadapi; pemikiran dan analisis yang mendalam dan komprehensif dalam perumusan strategi; memana strategi yang berhasil dan tidak; dan di antara strategi yang tersedia tidak saling bertentangan, namun saling melengkapi. Dalam Renstra PD juga perlu ditetapkan arah dan tujuan kemana pelayanan PD akan dikembangkan; apa yang hendak dicapai pada masa 5 (lima) tahun mendatang; bagaimana mencapainya, dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Visi Kota Blitar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Blitar Tahun 2021- 2026 adalah **“Terwujudnya KOTA BLITAR KEREN : UNGGUL, MAKMUR, BERMARTABAT”**. Adapun Misi Kota Blitar tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender dan Berkepribadian dalam Kebudayaan;
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter;
3. Berdikari Secara Ekonomi yang Berorientasi pada Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Perdagangan Berbasis Digital;
4. Meningkatkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan;
5. Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi.

Keterkaitan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dengan RPJMD

RPJMD 2021-2026	RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026
VISI	TUJUAN
Terwujudnya KOTA BLITAR KEREN : UNGGUL, MAKMUR, BERMARTABAT	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
MISI 4	SASARAN
Meningkatkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan	Meningkatnya lingkungan bersih dan hijau
TUJUAN	Indikator :
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1. Persentase badan air yang memenuhi baku mutu
	2. Persentase kawasan yang memenuhi baku mutu udara (kawasan industri, pemukiman, perkantoran, dan transportasi)
	3. Persentase RTH yang terkelola
	4. Capaian layanan persampahan perkotaan
	5. Persentase usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang terkelola dengan baik
	6. Nilai SAKIP Perangkat Daerah
SASARAN	
1. Meningkatnya kualitas air	
2. Meningkatnya kualitas udara	
3. Meningkatnya kualitas lahan	
4. Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3	
	PROGRAM
	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
	3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
	4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
	5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
	6. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
	7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
	8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
	9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
	10. Program Pengelolaan Persampahan

I. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi

1. Peningkatan pengendalian pencemaran air
2. Peningkatan kualitas perencanaan, pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup.
3. Optimalisasi pengendalian pencemaran udara.
4. Optimalisasi ketersediaan dan kualitas RTH.
5. Optimalisasi pengelolaan sampah.
6. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
7. Optimalisasi pengelolaan limbah B3.

Kebijakan

1. Peningkatan pengawasan sumber-sumber pencemaran air
2. Optimalisasi layanan pengaduan lingkungan hidup
3. Peningkatan pembinaan pelaku usaha
4. Peningkatan ketersediaan dokumen perencanaan
5. Peningkatan peran masyarakat dalam pengurangan gas
6. Optimalisasi penggunaan energi alternatif
7. Optimalisasi pemantauan kualitas udara
8. Peningkatan peran serta masyarakat dalam peningkatan ketersediaan dan kualitas RTH
9. Optimalisasi layanan sampah perkotaan
10. Peningkatan pengelolaan sampah 3R
11. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana persampahan
12. Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah
13. Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan lingkungan hidup
14. Pemberian penghargaan masyarakat peduli lingkungan
15. Peningkatan pembinaan pelaku usaha dan kegiatan penghasil limbah B3

I. Tujuan & Sasaran Tahun 2024

Berdasarkan hasil analisis terhadap perkembangan kondisi dan kebutuhan organisasi, maka ditetapkan Tujuan dan Sasaran Dinas lingkungan hidup Kota Blitar Tahun 2024 sebagai berikut :

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR SASARAN	
(1)	(2)	(3)		(6)	(7)	
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1	Indeks kualitas air	1 Meningkatnya lingkungan bersih dan hijau	1	Persentase badan air yang memenuhi baku mutu
		2	Indeks kualitas udara		2	Persentase kawasan yang memenuhi baku mutu udara (kawasan industri, pemukiman, perkantoran, dan transportasi)
		3	Indeks kualitas lahan		3	Persentase RTH yang terkelola
		4	Persentase capaian layanan persampahan		4	Capaian layanan persampahan perkotaan
		5	Persentase ketaatan pelaku usaha penghasil limbah B3		5	Persentase usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang terkelola dengan baik
2	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	6	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	2 Meningkatnya kinerja perangkat daerah	6	Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Program yang mendukung pencapaian sasaran disampaikan berikut:

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Persentase badan air yang memenuhi baku mutu	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase titik sampling badan air yang memenuhi baku mutu
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase kasus/aduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti
		Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pelaku usaha yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersedia
	2	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Penurunan Nilai Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO2eq)
			Persentase titik sampling udara ambien yang memenuhi baku mutu
	3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase luasan RTH publik terhadap luas wilayah kota
	4	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah tertangani
			Persentase sampah yang dikelola berbasis 3R
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase kelompok masyarakat peduli lingkungan yang dibina
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase kelurahan berseri
			Persentase sekolah peduli dan berbudaya lingkungan (adiwiyata)
			Jumlah predikat pengelolaan lingkungan hidup (adipura)
	6	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan	Persentase pelaku usaha yang memiliki

SASARAN		INDIKATOR SASARAN		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM
(1)		(2)		(3)	(4)
			penghasil limbah B3 yang terkelola dengan baik	Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	izin penyimpanan limbah B3 sementara yang taat peraturan
6	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	7	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

B. Perjanjian Kinerja

Rencana Kinerja Tahun 2024 Dinas lingkungan hidup Kota Blitar adalah penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas lingkungan hidup Kota Blitar Tahun 2021-2026. Rencana kinerja tersebut diuraikan dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, yang merupakan komitmen Dinas lingkungan hidup dalam pelaksanaan kinerja sasaran dan tujuan selama Tahun 2024.

Perjanjian Kinerja Dinas lingkungan hidup selama Tahun 2024 dan keselarasannya dengan pencapaian misi RENSTRA 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

No.	Kinerja Utama / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas air	67,78
		Indeks kualitas udara	86,43
		Indeks kualitas lahan	56,23
		Persentase capaian layanan persampahan	97,78%
2	Meningkatnya lingkungan bersih dan hijau	Persentase badan air yang memenuhi baku mutu	85,00%
		Persentase kawasan yang memenuhi baku mutu udara (kawasan industri, pemukiman, perkantoran, dan transportasi)	100,00%
		Persentase RTH yang terkelola	100,00%
		Persentase sampah terkelola	97,78%
		Persentase usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang terkelola dengan baik	75,00%
3	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	87,00 (A)

PROGRAM	ANGGARAN	SUMBER DANA
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.494.345.016	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	273.880.790	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	477.668.350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil, Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	6.699.443.619	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi; Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	14.444.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	64.724.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	453.595.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer UmumDana Bagi Hasil
Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	416.009.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer UmumDana Bagi Hasil
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	4.240.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Program Pengelolaan Persampahan	11.052.180.095	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil, Insentif Fiskal, Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan
TOTAL	25.950.533.170	

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang ditetapkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa yang akan datang. Metode ini akan bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA/SASARAN

Pengukuran kinerja merupakan proses berkesinambungan untuk menilai tingkat keberhasilan dan atau/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dengan sasaran yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi instansi. Hasil pengukuran kinerja Dinas lingkungan hidup Kota Blitar Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja

NO	KINERJA UTAMA/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas air	67,78	56,11	82,78	Berhasil
		Indeks kualitas udara	86,43	89,79	103,89	Sangat Berhasil
		Indeks kualitas lahan	56,23	34,13	60,70	Cukup Berhasil
		Persentase capaian layanan persampahan	97,78	98,01	100,24	Sangat Berhasil
2	Meningkatnya lingkungan bersih dan hijau	Persentase badan air yang memenuhi baku mutu	85,00	27,22	32,02	Cukup Berhasil
		Persentase kawasan yang memenuhi baku mutu udara (kawasan industri, pemukiman, perkantoran, dan transportasi)	100,00	100,00	100,00	Sangat Berhasil
		Persentase RTH yang terkelola	100,00	100,00	100,00	Sangat Berhasil

NO	KINERJA UTAMA/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
		Persentase sampah terkelola	97,78	98,01	100,24	Sangat Berhasil
		Persentase usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang terkelola dengan baik	75,00	75,01	100,01	Sangat Berhasil
3	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	87,00 (A)	85,21 (A)	97,94	Sangat Berhasil
Rata - Rata capaian target					87,78%	BERHASIL

Berdasarkan akumulasi capaian indikator kinerja dari masing-masing kebijakan yang telah dijabarkan sampai pada program dan kegiatan tersebut, menunjukkan bahwa untuk pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas lingkungan hidup Kota Blitar selama tahun 2024 termasuk kategori **BERHASIL** dengan nilai capaian kinerja 87,78%.

1. ANALISIS CAPAIAN KINERJA BERDASAKAN TARGET DAN REALISASI TAHUN 2024

Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar telah menetapkan 1 (satu) Kinerja Utama dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU), serta 2 (dua) Sasaran Strategis dan 6 (enam) Indikator Sasaran Strategis beserta targetnya untuk dicapai pada Tahun 2024. Capaian Kinerja Utama dan Sasaran Strategis selama Tahun 2024 dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Kinerja Utama 1 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

Indikator :

1. Indeks kualitas air

Indikator Kinerja	Rumus Perhitungan	Target 2024	Realisasi 2024	%
Indeks kualitas air	Kalkulator Indeks Kualitas Air	67,78	56,11	82,78%

Analisis :

Pada tahun 2024, realisasi Indeks Kualitas Air adalah 56,11 atau sebesar 82,78% dari target 67,78. Perhitungan Indeks Kualitas Air diambil dari hasil uji badan air yang dilakukan di 18 titik lokasi dengan frekuensi 2 kali pemantauan. Dari total 2 kali pemantauan tersebut, didapatkan data bahwa 14 titik memenuhi baku mutu, 19 titik mengalami cemar ringan, 3 titik mengalami cemar sedang, dan tidak terdapat titik sampling yang mengalami cemar berat. Faktor pendorong keberhasilan pencapaian indikator ini adalah dengan melaksanakan uji kualitas air secara rutin, dan berupaya

melaksanakan pembinaan yang rutin dilakukan kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan penghasil air limbah.

- **Kendala yang Dihadapi :** Masih adanya pencemaran dari industri, ternak, dan dari sektor domestik yang menyebabkan penurunan kualitas air sungai.
- **Rencana Tindak Lanjut :**
 - Melakukan pembinaan dan monev terhadap pelaku usaha industri dan peternak yang diindikasikan menyebabkan terjadinya pencemaran air.
 - Berkoordinasi dengan DPUPR sebagai OPD yang memiliki tupoksi atas pengelolaan limbah domestik.

2. Indeks kualitas udara

Indikator Kinerja	Rumus Perhitungan	Target 2024	Realisasi 2024	%
Indeks kualitas Udara	Kalkulator Indeks Kualitas Udara	86,43	89,79	103,89%

Analisis :

Pada tahun 2024, realisasi Indeks Kualitas Udara adalah 89,79 atau sebesar 103,89% dari target 86,43. Perhitungan Indeks Kualitas Udara di ambil dari hasil uji kualitas udara ambien di 4 lokasi dengan frekuensi 2 kali pemantauan yang meliputi sektor perkantoran, industri, perumahan dan transportasi. Dari 4 lokasi tersebut, semua titik lokasi memenuhi baku mutu udara ambien. Selanjutnya hasil uji dimasukkan ke dalam kalkulator perhitungan Indeks Kualitas Udara. Faktor pendorong tercapainya indikator ini adalah dengan melaksanakan gerakan reboisasi dan penanaman pohon secara klaster.

- **Kendala yang Dihadapi :**
 - Belum adanya monitoring terhadap emisi dari kendaraan diluar KIR
 - Car free day tidak diselenggarakan secara rutin
- **Rencana Tindak Lanjut :**
 - Bekerja sama dengan Dishub untuk melaksanakan uji emisi kendaraan secara rutin.
 - Pengadaan alat uji emisi transportasi.
 - Mendorong pelaksanaan car free day secara rutin.

3. Indeks kualitas lahan

Indikator Kinerja	Rumus Perhitungan	Target 2024	Realisasi 2024	%
-------------------	-------------------	-------------	----------------	---

Indeks kualitas Lahan	Kalkulator			
	Indeks			
	Kualitas	56,23	34,13	60,70%
	Lahan			

Analisis :

Pada tahun 2024, realisasi Indeks Kualitas Lahan adalah 34,13 atau sebesar 60,70% dari target 56,23. Indeks kualitas lahan merupakan perhitungan dari luas tutupan vegetasi di RTH publik dan RTH privat. RTH publik adalah RTH yang dikelola pemerintah dan dapat di akses secara bebas oleh masyarakat. Sedangkan RTH privat adalah RTH yang dikelola sendiri oleh masyarakat atau instansi bisa berupa lahan pekarangan, taman lingkungan pemukiman, taman kantor dan taman gedung komersial. Penilaian kualitas lahan dilakukan dengan mendeleniasi pohon yang bersifat keras. Dari hasil deleniasi yang telah dilakukan secara mandiri oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar dan telah divalidasi oleh KLHK, terdapat 80,5736410848 ha luas RTH, 587,91480888 ha tutupan vegetasi relevan lainnya, dan 0,618861853 ha rehabilitasi hutan dan lahan yang dinilai. Saat ini alih fungsi lahan menyebabkan berkurangnya pohon keras sehingga mempengaruhi nilai dari Indeks Kualitas Lahan. Faktor pendorong tercapainya indikator ini adalah pembangunan dan pemeliharaan RTH Publik.

- **Kendala yang Dihadapi :**
 - Perubahan metode penilaian IKL (metode delineasi)
 - Meningkatnya kebutuhan sarana dan prasarana kota sejalan dengan alih fungsi lahan, menyebabkan berkurangnya tutupan lahan di Kota Blitar.
- **Rencana Tindak Lanjut :**
 - Perhitungan IKL menggunakan citra satelit, diupayakan melaksanakan penanaman tanaman penghijauan menggunakan tanaman yang bertajuk lebar.

4. Persentase capaian layanan persampahan

Indikator Kinerja	Rumus Perhitungan	Target 2024	Realisasi 2024	%
Persentase capaian layanan persampahan	Jumlah			
	volume			
	sampah			
	terolah	97,78%	98,01%	100,24%
	----- x 100%			
	Jumlah total			

timbulan
sampah

Analisis :

Pada tahun 2024, realisasi persentase capaian layanan persampahan adalah 98,01% atau sebesar 100,24% dari target 97,78%. Peningkatan jumlah penduduk diikuti peningkatan jumlah volume sampah yang cukup pesat, hal ini mengakibatkan daya tampung TPA semakin berkurang. Seiring dengan hal tersebut pemerintah memberikan target bahwa tren pengolahan sampah adalah pengurangan volume sampah yang terolah di TPA dan peningkatan volume sampah yang terolah di masyarakat / dari sumbernya. Berikut adalah penanganan sampah dari berbagai aspek

1. Pengolahan sampah di TPA = 20.168,81 ton/tahun
2. TPST 3R dan pengomposan = 2.984,97 ton/tahun
3. Bank Sampah dan daur ulang sampah = 4.547,53 ton/tahun

Adapun perkiraan total timbulan sampah pada tahun 2024 sejumlah 28.263,775 ton/tahun yang diperoleh dari 3 kecamatan di Kota Blitar. Faktor pendorong tercapainya indikator ini adalah pembinaan para pelaku pengelola sampah (Bank Sampah, pemilah, dan pengirit sampah); dan pengelolaan sampah secara *sanitary landfill*.

- Kendala yang Dihadapi :

Meningkatnya jumlah timbulan sampah tiap tahunnya dikarenakan peningkatan jumlah penduduk yang mengakibatkan daya tampung TPA semakin berkurang.
- Rencana Tindak Lanjut :

Optimalisasi pemanfaatan Cell 1 dan penataan lahan yang lebih efektif.

Pembentukan kampung Zero Waste.

2. Kinerja Sasaran 1 : Meningkatnya lingkungan bersih dan hijau

Indikator :

5. Persentase badan air yang memenuhi baku mutu

Indikator Kinerja	Rumus Perhitungan	Target 2024	Realisasi 2024	%
Persentase badan air yang memenuhi baku mutu	Jumlah badan air yang memenuhi baku mutu	85,00%	27,22%	32,02%

baku mutu	----- x 100%
Jumlah badan	
air yang	
ditetapkan	

Analisis :

Pada tahun 2024, realisasi persentase badan air yang memenuhi baku mutu adalah 27,22% atau sebesar 32,02% dari target 85,00%. Berdasarkan hasil uji badan air yang dilakukan di 18 titik lokasi dengan frekuensi 2 kali pemantauan, didapatkan data bahwa 14 titik memenuhi baku mutu, 19 titik mengalami cemar ringan, 3 titik mengalami cemar sedang, dan tidak terdapat titik sampling yang mengalami cemar berat. Faktor pendorong keberhasilan pencapaian indikator ini adalah dengan melaksanakan uji kualitas air secara rutin, dan berupaya melaksanakan pembinaan yang rutin dilakukan kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan penghasil air limbah.

- **Kendala yang Dihadapi :** Masih adanya pencemaran dari industri, ternak, dan dari sektor domestik yang menyebabkan penurunan kualitas air sungai.
- **Rencana Tindak Lanjut :**
 - Melakukan pembinaan dan monev terhadap pelaku usaha industri dan peternak yang diindikasikan menyebabkan terjadinya pencemaran air.
 - Berkoordinasi dengan DPUPR sebagai OPD yang memiliki tupoksi atas pengelolaan limbah domestik.

3. Kinerja Sasaran 2 : Meningkatnya pengendalian pencemaran udara

Indikator :

6. Persentase kawasan yang memenuhi baku mutu udara (kawasan industri, pemukiman, perkantoran, dan transportasi)

Indikator Kinerja	Rumus Perhitungan	Target 2024	Realisasi 2024	%
Persentase kawasan yang memenuhi baku mutu udara (kawasan industri, pemukiman, perkantoran, dan	Jumlah kawasan yang memenuhi baku mutu ----- x 100% Jumlah kawasan yang ditetapkan	100,00%	100,00%	100,00%

transportasi)

Analisis :

Pada tahun 2024, realisasi Persentase kawasan yang memenuhi baku mutu udara (kawasan industri, pemukiman, perkantoran, dan transportasi) adalah 100,00% atau sebesar 100,00% dari target 100,00%. Perhitungan Persentase kawasan yang memenuhi baku mutu udara diambil dari hasil uji kualitas udara ambien di 4 lokasi dengan frekuensi 2 kali pemantauan yang meliputi sektor perkantoran, industri, perumahan dan transportasi. Dari 4 lokasi tersebut, semua titik lokasi memenuhi baku mutu udara ambien. Selanjutnya hasil uji dimasukkan ke dalam kalkulator perhitungan Indeks Kualitas Udara. Faktor pendorong tercapainya indikator ini adalah dengan melaksanakan gerakan reboisasi dan penanaman pohon secara klaster.

- **Kendala yang Dihadapi :**
 - Belum adanya monitoring terhadap emisi dari kendaraan diluar KIR
 - Car free day tidak diselenggarakan secara rutin
- **Rencana Tindak Lanjut :**
 - Bekerja sama dengan Dishub untuk melaksanakan uji emisi kendaraan secara rutin.
 - Pengadaan alat uji emisi transportasi.
 - Mendorong pelaksanaan car free day secara rutin.

4. Kinerja Sasaran 3 : Meningkatnya ketersediaan dan kualitas RTH

Indikator :

7. Persentase RTH yang terkelola

Indikator Kinerja	Rumus Perhitungan	Target 2024	Realisasi 2024	%
Persentase RTH yang terkelola	Luas RTH yang terkelola ----- x 100%	100,00%	100,00%	100,00%
	Luas RTH yang ditetapkan			

Analisis :

Pada tahun 2024, realisasi persentase RTH yang terkelola adalah 100% atau sebesar 100%, dari target 100%. Seluruh RTH publik di Kota Blitar dikelola Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar. Faktor pendorong tercapainya indikator ini adalah tersedianya dan terpeliharanya sarana prasarana serta tanaman di RTH.

- **Kendala yang Dihadapi** : Banyak permintaan pemotongan pohon besar, yang tidak diimbangi dengan jumlah pohon yang ditanam.
- **Rencana Tindak Lanjut** : Memaksimalkan pemeliharaan sarana dan prasarana serta tanaman di RTH.

5. **Kinerja Sasaran 4** : Meningkatnya layanan pengelolaan persampahan

Indikator :

9. **Persentase sampah terkelola**

Indikator Kinerja	Rumus Perhitungan	Target 2024	Realisasi 2024	%
Persentase sampah terkelola	(Jumlah volume sampah terkelola / Jumlah timbulan sampah dalam satu tahun) x 100%	97,78%	98,01%	100,24%

Analisis :

Pada tahun 2024, realisasi capaian layanan persampahan perkotaan adalah 98,01% atau sebesar 100,24% dari target 97,78%. Persentase sampah yang tertangani pada tahun 2024 adalah 81,92%, sedangkan persentase sampah yang berkurang pada tahun 2024 adalah 16,09%. Faktor pendorong tercapainya indikator ini adalah pembinaan para pelaku pengelola sampah (Bank Sampah, pemilah, dan pengirit sampah); dan pengelolaan sampah secara *sanitary landfill*.

- **Kendala yang Dihadapi** :
 - Meningkatnya jumlah timbulan sampah tiap tahunnya dikarenakan peningkatan jumlah penduduk yang mengakibatkan daya tampung TPA semakin berkurang.
- **Rencana Tindak Lanjut** :
 - Optimalisasi pemanfaatan Cell 1 dan penataan lahan yang lebih efektif.
 - Pembentukan kampung Zero Waste.

6. **Kinerja Sasaran 5** : Meningkatnya pengelolaan limbah B3

Indikator :

9. Persentase usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang terkelola dengan baik

Indikator Kinerja	Rumus Perhitungan	Target 2024	Realisasi 2024	%
Persentase usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang terkelola dengan baik	Jumlah usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang terkelola dengan baik			
	----- x 100%	75,00%	75,01%	100,01%
	Jumlah usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang ditetapkan			

Analisis :

Pada tahun 2024, realisasi persentase usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang terkelola dengan baik adalah 75,01% atau sebesar 100,01% dari target 75,00%. Berdasarkan laporan pemantauan Limbah B3 pada 42 lokasi usaha penghasil limbah B3 di Kota Blitar, terdapat 31,505 usaha yang taat, dan 10,495 usaha yang tidak taat. Faktor pendorong tercapainya indikator ini adalah dengan melakukan pembinaan dan pemantauan yang dilakukan secara rutin kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3.

- **Kendala yang Dihadapi :** Kurangnya kesadaran pelaku usaha dan/atau kegiatan penghasil B3 untuk melaporkan pengelolaan LB3 kepada DLH Kota Blitar.
- **Rencana Tindak Lanjut :**
 - Melakukan sosialisasi.
 - Melakukan pemantauan secara rutin kepala pelaku usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 untuk dilakukan pelaporan.

7. Kinerja Sasaran 2 : Meningkatnya kinerja perangkat daerah

Indikator :

11. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Indikator Kinerja	Rumus Perhitungan	Target 2024	Realisasi 2024	%
Nilai SAKIP	Nilai SAKIP			
Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	87,00 (A)	85,21 (A)	97,94%

Analisis :

Pada tahun 2024, Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar memperoleh predikat A untuk penilaian SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai 85,21, dari target nilai 87. Sehingga peroleh nilai SAKIP DLH 2024 tercapai sebesar 97,94%. Faktor pendorong dalam pencapaian nilai SAKIP Perangkat Daerah ini adalah dukungan dari semua bidang dalam pemenuhan dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja serta evaluasi internal yang memenuhi standar sesuai dengan pertauran yang telah di tetapkan.

- **Kendala yang Dihadapi** : Berdasarkan rekomendasi dari evaluasi SAKIP DLH 2024, ditemukan berbagai kendala pada dokumen berikut ini :
 - Target yang ditetapkan tidak menantang karena belum memperhatikan capaian periode sebelumnya.
 - Crosscutting yang dihasilkan belum terintegrasi dengan SOP.
 - Belum terdapat tindak lanjut dari rekomendasi yang diberikan dari hasil monitoring target jangka menengah.
 - Hasil reviu dokumen Renstra belum menunjukkan upaya perbaikan yang memuat inovasi program/kegiatan yang direncanakan.
 - Data kinerja yang dikumpulkan belum sepenuhnya lengkap.
 - Pengukuran kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi penyesuaian (refocusing) organisasi, strategi dan kebijakan dalam mencapai kinerja.
 - Belum seluruh unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.
 - Penyajian informasi dalam laporan kinerja belum menjadi kepedulian seluruh pegawai.
 - Tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP belum dimanfaatkan secara optimal untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, serta perbaikan dan peningkatan kinerja.
- **Rencana Tindak Lanjut** : Berdasarkan rekomendasi dari evaluasi SAKIP DLH 2024, maka didapatkan rencana tindak lanjut untuk penilaian tahun berikutnya sebagai berikut :
 - Menyesuaikan target kinerja pada Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan memperhatikan capaian tahun sebelumnya.

- Menyusun SOP yang mengintegrasikan crosscutting di dalamnya.
- Menyusun tindak lanjut rekomendasi monitoring pencapaian kinerja jangka menengah.
- Menyusun Ranwal Renstra yang memuat inovasi yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah selama 5 (lima) tahun.
- Memastikan data pembentuk indikator kinerja sudah terdokumentasi dengan baik dalam proses pengukuran kinerja.
- Menyusun Rancangan LKjIP 2024 yang menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.
- Bukti sosialisasi kepada seluruh unit/satuan kerja atas hasil pengukuran kinerja berupa :
 - Undangan rapat
 - Notulen rapat yang berisi antara lain realisasi pengukuran kinerja, pembahasan faktor pendorong, permasalahan/ penghambat dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/ inovasi yang dilakukan untuk mencapai kinerja.
 - Dokumentasi kegiatan
- Bukti sosialisasi kepada seluruh pegawai tentang informasi pada LKjIP berupa :
 - Undangan rapat
 - Notulen rapat yang berisi antara lain realisasi kinerja, pembahasan faktor pendorong, permasalahan/ penghambat dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/ inovasi yang dilakukan untuk mencapai kinerja.
 - Dokumentasi kegiatan
- Bukti pemanfaatan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja :
 - Perubahan Renja
 - Perubahan PK 2024
 - Crosscutting antar bidang
 - Pohon Kinerja yang dilengkapi Crosscutting antar bidang
 - Laporan Monev Renaksi yang menyajikan penyesuaian strategi dan kebijakan dan bukti tindak lanjut atas rekomendasi monev renaksi.

○ PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 - 2024

Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2022 - 2024

No.	Sasaran Strategis/ Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target			Realisasi		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)		
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas air	59,92	61,72	67,78	59,73	67,78	56,11
		Indeks kualitas udara	84,53	85,48	86,43	85,9	85,83	89,79
		Indeks kualitas lahan	55,23	55,73	56,23	31,5	33,51	34,13
		Persentase capaian layanan persampahan	93	94	97,78	97,73	97,78	98,01
2	Meningkatnya lingkungan bersih dan hijau	Persentase badan air yang memenuhi baku mutu	NA	82,5	85,00	NA	91,67	27,22
		Persentase kawasan yang memenuhi baku mutu udara (kawasan industri, pemukiman, perkantoran, dan transportasi)	NA	100	100,00	NA	100	100,00
		Persentase RTH yang terkelola	96,10	100,00	100,00	96,10	100,00	100,00
		Persentase sampah terkelola	94	94,99	97,78	97,73	97,78	98,01
		Persentase usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang terkelola dengan baik	NA	72,5	75,00	NA	73,81	75,01
3	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85 (A)	86,00 (A)	87,00 (A)	84,68 (A)	85,05 (A)	85,21 (A)

Pembangunan Aloon-aloon Tahap 2 dan Pembangunan Outbond Gedog Tahap 1 merupakan sebuah pembangunan untuk mendukung misi ke-4 RPJMD Kota Blitar 2021-2026 yaitu Meningkatkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan.

3. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA s/d AKHIR PERIODE RENSTRA

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan akhir periode Renstra

Kinerja Utama / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target akhir RPJMD / RENSTRA	Realisasi s/d tahun 2024	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas air	65,32	56,11	85,90%
	Indeks kualitas udara	87,40	89,79	102,73%
	Indeks kualitas lahan	56,78	34,13	60,11%
	Persentase capaian layanan persampahan	98,00	98,01	100,01%
Meningkatnya lingkungan bersih dan hijau	Persentase badan air yang memenuhi baku mutu	90,00	27,22	30,24%
	Persentase kawasan yang memenuhi baku mutu udara (kawasan industri, pemukiman, perkantoran, dan transportasi)	100,00	100,00	100,00%
	Persentase RTH yang terkelola	100,00	100,00	100,00%
	Capaian layanan persampahan perkotaan	98,00	98,01	100,01%
	Persentase usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang terkelola dengan baik	80,00	75,01	93,76%
Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	89 (A)	85,21 (A)	95,74%

4. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN REALISASI NASIONAL ATAU REALISASI KABUPATEN/KOTA

3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo

Kinerja Utama / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		Keterangan
		Kota Blitar	Kabupaten Probolinggo	
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas air	67,78	36,25	Melebihi
	Indeks kualitas udara	85,83	88,71	Kurang dari
	Indeks kualitas lahan	33,51	54,82	Kurang dari
	Persentase capaian layanan persampahan	97,78	45,55	Melebihi
Meningkatnya lingkungan bersih dan hijau	Persentase badan air yang memenuhi baku mutu	91,67	-	-
	Persentase kawasan yang memenuhi baku mutu udara (kawasan industri, pemukiman, perkantoran, dan transportasi)	100	-	-
	Persentase RTH yang terkelola	100	-	-
	Capaian layanan persampahan perkotaan	97,78	45,55	Melebihi
	Persentase usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang terkelola dengan baik	73,81	-	-
Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,05 (A)	-	-

AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Alokasi Anggaran Tiap Sasaran

Tabel 3.5 Alokasi Anggaran Tiap Sasaran

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN (Rp)	% ANGGARAN
1	Meningkatnya lingkungan bersih dan hijau	Persentase badan air yang memenuhi baku mutu	494.915.590,00	1,91%
		Persentase kawasan yang memenuhi baku mutu udara (kawasan industri, pemukiman, perkantoran, dan transportasi)	325.598.350,00	1,25%
		Persentase RTH yang terkelola	6.699.443.619,00	25,82%
		Persentase sampah terkelola	11.921.785.795,00	45,94%
		Persentase usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang terkelola dengan baik	14.444.800,00	0,06%
2	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	6.494.345.016,00	25,03%
JUMLAH			25.950.533.170,00	100,00%

Total alokasi anggaran untuk 2 sasaran pembangunan Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2024 adalah Rp 25.950.533.170,00 yang mana terbagi dalam 6 indikator sasaran. Indikator sasaran pertama yaitu Persentase badan air yang memenuhi baku mutu memiliki nilai anggaran sebesar **Rp 494.915.590,00** atau **1,91%** dari total anggaran yang telah teralokasi. Indikator sasaran selanjutnya adalah Persentase kawasan yang memenuhi baku mutu udara (kawasan industri, pemukiman, perkantoran, dan transportasi) yang memiliki nilai anggaran sebesar **Rp 325.598.350,00** atau **1,25%** dari total anggaran yang telah teralokasi. Indikator sasaran selanjutnya adalah Persentase RTH yang terkelola yang memiliki nilai anggaran sebesar **Rp 6.699.443.619,00** atau **25,82%** dari total anggaran yang telah teralokasi. Indikator Sasaran selanjutnya adalah Persentase sampah terkelola yang memiliki nilai anggaran sebesar **Rp 11.921.785.795,00** atau **45,94%** dari total anggaran yang telah teralokasi. Indikator Sasaran selanjutnya adalah Persentase usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang terkelola dengan baik yang memiliki nilai anggaran sebesar **Rp 14.444.800,00** atau **0,06%** dari total anggaran yang telah teralokasi. Dan indikator sasaran terakhir adalah Nilai SAKIP Perangkat Daerah yang memiliki nilai anggarang sebesar **Rp 6.494.345.016,00** atau **25,03%** dari total anggaran yang telah teralokasi.

2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Tabel 3.6 Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Tujuan / Sasaran / Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas air	67,78	56,11	82,78%	494.915.590,00	460.386.628,00	93,02%
Sasaran 1 : Meningkatnya lingkungan bersih dan hijau	Persentase badan air yang memenuhi baku mutu	85,00	27,22	32,02%	494.915.590,00	460.386.628,00	93,02%
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase titik sampling badan air yang memenuhi baku mutu	56	59	105,36%	152.070.000,00	152.058.900,00	99,99%
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah aksi pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang terlaksana	3	3	100,00%	152.070.000,00	152.058.900,00	99,99%
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1	1	100,00%	152.070.000,00	152.058.900,00	99,99%
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kasus/aduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100	100	100,00%	4.240.000,00	4.180.000,00	98,58%
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah kasus/aduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	1	1	100,00%	4.240.000,00	4.180.000,00	98,58%
Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	1	1	100,00%	4.240.000,00	4.180.000,00	98,58%

Tujuan / Sasaran / Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
tingkat Kabupaten/Kota	Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani						
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pelaku usaha yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup	65	65	100,00%	64.724.800,00	64.087.500,00	99,02%
<i>Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah pelaku usaha yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup</i>	<i>60</i>	<i>64</i>	<i>106,67%</i>	<i>64.724.800,00</i>	<i>64.087.500,00</i>	<i>99,02%</i>
Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	12	12	100,00%	43.863.800,00	43.677.500,00	99,58%
Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	60	94	156,67%	20.861.000,00	20.410.000,00	97,84%
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersedia	100	100	100,00%	273.880.790,00	240.060.228,00	87,65%
<i>Rencana</i>	<i>Jumlah</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>200,00%</i>	<i>273.880.790,00</i>	<i>240.060.228,00</i>	<i>87,65%</i>

Tujuan / Sasaran / Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun						
Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	2	2	100,00%	273.880.790,00	240.060.228,00	87,65%
Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas udara	86,43	89,79	103,89%	325.598.350,00	322.034.399,00	98,91%
Sasaran 1 : Meningkatnya lingkungan bersih dan hijau	Persentase kawasan yang memenuhi baku mutu udara (kawasan industri, pemukiman, perkantoran, dan transportasi)	100	100	100,00%	325.598.350,00	322.034.399,00	98,91%
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penurunan emisi gas rumah kaca (ton CO2eq)	8,95	8,95	100,00%	325.598.350,00	322.034.399,00	98,91%
	Persentase titik sampling udara ambien yang memenuhi baku mutu	100	100	100,00%			
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah titik sampling udara ambien yang memenuhi baku mutu	18	18	100,00%	325.598.350,00	322.034.399,00	98,91%
	Jumlah kegiatan dampak pengendalian perubahan iklim	3	3	100,00%			
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca,	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi	1	1	100,00%	325.598.350,00	322.034.399,00	98,91%

Tujuan / Sasaran / Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan						
Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lahan	56,23	34,13	60,70%	6.699.443.619,00	6.082.037.357,00	90,78%
Sasaran 1 : Meningkatnya lingkungan bersih dan hijau	Persentase RTH yang terkelola	100	100	100,00%	6.699.443.619,00	6.082.037.357,00	90,78%
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase luasan RTH publik terhadap luas wilayah kota	16,274	16,274	100,00%	6.699.443.619,00	6.082.037.357,00	90,78%
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas RTH Publik yang Terkelola	420,34	420,36	100,00%	6.699.443.619,00	6.082.037.357,00	90,78%
Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	14	14	100,00%	6.699.443.619,00	6.082.037.357,00	90,78%
Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Persentase capaian layanan persampahan	97,78	98,01	100,24%	11.936.230.595,00	11.878.184.222,00	99,51%
	Persentase ketaatan pelaku usaha penghasil limbah B3						
Sasaran 1 : Meningkatnya lingkungan bersih dan hijau	Persentase sampah terkelola	97,78	98,01	100,24%	11.921.785.795,00	11.864.976.222,00	99,52%
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase sampah tertangani	83,15	81,92	98,52%	11.052.180.095,00	11.007.651.672,00	99,60%
	Persentase sampah yang dikelola berbasis 3R	12,85	16,09	125,21%			
Pengelolaan Sampah	Volume sampah yang berkurang	3680,54	4547,53	123,56%	11.052.180.095,00	11.007.651.672,00	99,60%
	Volume sampah tertangani	22808,21	23153,78	101,52%			
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang	3	3	100,00%	438.367.000,00	428.894.800,00	97,84%

Tujuan / Sasaran / Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
	Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat						
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	11	11	100,00%	3.298.527.849,00	3.264.873.672,00	98,98%
Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	90	90	100,00%	7.315.285.246,00	7.313.883.200,00	99,98%
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase kelompok masyarakat peduli lingkungan yang dibina	100	100	100,00%	453.595.900,00	444.009.500,00	97,89%
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok masyarakat peduli lingkungan yang dibina	21	21	100,00%	453.595.900,00	444.009.500,00	97,89%
Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	2	2	100,00%	221.947.400,00	220.767.000,00	99,47%
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	14	14	100,00%	231.648.500,00	223.242.500,00	96,37%

Tujuan / Sasaran / Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
masyarakat							
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase sekolah peduli dan berbudaya lingkungan (adiwiyata)	26,21	54,62	208,39%	416.009.800,00	413.315.050,00	99,35%
	Jumlah Predikat pengelolaan lingkungan hidup (adipura)	1	1	100,00%			
	Persentase kelurahan berseri	50,79	82,54	162,51%			
<i>Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah predikat adiwiyata yang diperoleh</i>	61	71	116,39%	416.009.800,00	413.315.050,00	99,35%
	<i>Jumlah predikat kelurahan berseri yang diperoleh</i>	18	52	288,89%			
Penilaian Kinerja Masyarakat/Lemba ga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantro pi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lem baga Masyarakat/Dun ia Usaha/Dunia Pendidikan/Filan trophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	5	5	100,00%	416.009.800,00	413.315.050,00	99,35%
Sasaran 1 : Meningkatnya lingkungan bersih dan hijau	Persentase usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang terkelola dengan baik	75	75,01	100,01%	14.444.800,00	13.208.000,00	91,44%
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pelaku usaha yang memiliki izin penyimpanan limbah B3 sementara yang taat peraturan	100	100	100,00%	14.444.800,00	13.208.000,00	91,44%
<i>Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang taat peraturan</i>	45	45	100,00%	14.444.800,00	13.208.000,00	91,44%

Tujuan / Sasaran / Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	1	1	100,00%	14.444.800,00	13.208.000,00	91,44%
Tujuan 2 : Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	87,00 (A)	85,21 (A)	97,94%	6.494.345.016,00	6.453.009.701,00	99,36%
Sasaran 2 : Meningkatnya tata kelola perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	87,00 (A)	85,21 (A)	97,94%	6.494.345.016,00	6.453.009.701,00	99,36%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79,5	85,36	107,37%	6.494.345.016,00	6.453.009.701,00	99,36%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	1	100	10000,00 %	9.445.600,00	9.363.100,00	99,13%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	5	100,00%	4.980.000,00	4.935.000,00	99,10%

Tujuan / Sasaran / Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	2	100,00%	4.465.600,00	4.428.100,00	99,16%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100	100	100,00%	5.402.765.868,00	5.375.740.564,00	99,50%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57	48	84,21%	5.398.525.868,00	5.371.560.564,00	99,50%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	4	100,00%	4.240.000,00	4.180.000,00	98,58%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100	100	100,00%	142.103.300,00	141.784.700,00	99,78%
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3	3	100,00%	37.300.000,00	37.110.000,00	99,49%
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	69	69	100,00%	104.803.300,00	104.674.700,00	99,88%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi	100	100	100,00%	439.312.248,00	433.689.407,00	98,72%

Tujuan / Sasaran / Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
	<i>umum perangkat daerah sesuai standar</i>						
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	100,00%	2.994.100,00	2.980.500,00	99,55%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	5	100,00%	63.833.100,00	63.140.000,00	98,91%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	2	100,00%	4.523.700,00	4.496.000,00	99,39%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25	40	160,00%	103.642.700,00	101.614.500,00	98,04%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	100,00%	15.947.000,00	15.734.000,00	98,66%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36	36	100,00%	6.720.000,00	6.680.000,00	99,40%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	60	100,00%	241.651.648,00	239.044.407,00	98,92%
<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100,00%</i>	<i>338.129.600,00</i>	<i>332.356.179,00</i>	<i>98,29%</i>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24	24	100,00%	68.067.600,00	67.096.547,00	98,57%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	26	26	100,00%	270.062.000,00	265.259.632,00	98,22%

Tujuan / Sasaran / Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
	Umum Kantor yang Disediakan						
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100	100	100,00%	162.588.400,00	160.075.751,00	98,45%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	39	37	94,87%	129.353.200,00	127.156.251,00	98,30%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80	80	100,00%	30.255.000,00	29.972.500,00	99,07%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	98	98	100,00%	2.980.200,00	2.947.000,00	98,89%

3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas air	82,78%	93,02%	0,89
		Indeks kualitas udara	103,89%	98,91%	1,05
		Indeks kualitas lahan	60,70%	90,78%	0,67
		Persentase capaian layanan persampahan	100,24%	99,51%	1,01
2	Meningkatnya lingkungan bersih dan hijau	Persentase badan air yang memenuhi baku mutu	32,02%	93,02%	0,34
		Persentase kawasan yang memenuhi baku mutu udara (kawasan industri, pemukiman, perkantoran, dan transportasi)	100,00%	98,91%	1,01
		Persentase RTH yang terkelola	100,00%	90,78%	1,10
		Persentase sampah terkelola	100,24%	99,52%	1,01
		Persentase usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang terkelola dengan baik	100,01%	91,44%	1,09
3	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	97,94%	99,36%	0,99

Keterangan :

≥ 1 : Efisien

< 1 : Tidak Efisien

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa tingkat efisiensi dalam pencapaian kinerja utama dan sasaran strategis belum seluruhnya efisien. Terdapat 4 (empat) indikator kinerja yang menunjukkan tingkat efisiensi dibawah 1, sedangkan indikator kinerja yang lainnya memiliki tingkat efisiensi diatas 1. Karena semakin tinggi rasio efisiensi maka akan semakin efisien pula penggunaan anggaran dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Untuk pencapaian indikator Indeks kualitas air ketersediaan rasio efisiensi sebesar 0,89 yang berarti untuk pencapaian target kinerja sebesar 82,78% dibutuhkan realisasi anggaran sebesar 93,02% dan dikategorikan TIDAK EFISIEN. Kendala yang dihadapi adalah masih adanya pencemaran dari industri, ternak, dan dari sektor domestik yang menyebabkan penurunan kualitas air sungai. Sedangkan rencana tindak lanjutnya adalah melakukan pembinaan dan monev terhadap pelaku usaha industri dan peternak yang diindikasikan menyebabkan terjadinya pencemaran air. Serta melakukan koordinasi dengan DPUPR sebagai OPD yang memiliki tupoksi atas pengelolaan limbah domestik.

Untuk pencapaian indikator Indeks kualitas udara ketersediaan rasio efisiensi sebesar 1,05 yang berarti untuk pencapaian target kinerja sebesar 103,89% dibutuhkan realisasi anggaran sebesar 98,91% dan dikategorikan EFISIEN. Faktor pendorong tercapainya indikator ini adalah dengan melaksanakan gerakan reboisasi dan penanaman pohon secara klaster.

Untuk pencapaian indikator Indeks kualitas lahan ketersediaan rasio efisiensi sebesar 0,67 yang berarti untuk pencapaian target kinerja sebesar 60,70% dibutuhkan realisasi anggaran sebesar 90,78% dan dikategorikan TIDAK EFISIEN. Kendala yang dihadapi adalah adanya perubahan metode penilaian IKL (metode delineasi). Serta meningkatnya kebutuhan sarana dan prasarana kota sejalan dengan alih fungsi lahan, menyebabkan berkurangnya tutupan lahan di Kota Blitar. Sedangkan rencana tindak lanjutnya adalah diupayakan melaksanakan penanaman tanaman penghijauan menggunakan tanaman yang bertajuk lebar karena perhitungan IKL menggunakan citra satelit.

Untuk pencapaian indikator Persentase capaian layanan persampahan ketersediaan rasio efisiensi sebesar 1,01 yang berarti untuk pencapaian target kinerja sebesar 100,24% dibutuhkan realisasi anggaran sebesar 99,51% dan dikategorikan EFISIEN. Faktor pendorong tercapainya indikator ini adalah tersedianya sarana dan prasarana baik untuk penanganan dan pengurangan sampah.

Untuk pencapaian indikator Persentase badan air yang memenuhi baku mutu ketersediaan rasio efisiensi sebesar 0,34 yang berarti untuk pencapaian target kinerja sebesar 32,02% dibutuhkan realisasi anggaran sebesar 93,02% dan dikategorikan TIDAK EFISIEN. Kendala yang dihadapi adalah masih adanya pencemaran dari industri, ternak, dan dari sektor domestik yang menyebabkan penurunan kualitas air sungai. Sedangkan rencana tindak lanjutnya adalah dengan melakukan pembinaan dan monev terhadap pelaku usaha industri dan peternak yang diindikasikan menyebabkan terjadinya pencemaran air. Serta melakukan koordinasi dengan DPUPR sebagai OPD yang memiliki tupoksi atas pengelolaan limbah domestik.

Untuk pencapaian indikator Persentase kawasan yang memenuhi baku mutu udara ketersediaan rasio efisiensi sebesar 1,01 yang berarti untuk pencapaian target kinerja sebesar 100% dibutuhkan realisasi anggaran sebesar 98,91% dan dikategorikan EFISIEN. Faktor pendorong tercapainya indikator ini adalah dengan melaksanakan gerakan reboisasi dan penanaman pohon secara klaster.

Untuk pencapaian indikator Persentase RTH yang terkelola ketersediaan rasio efisiensi sebesar 1,10 yang berarti untuk pencapaian target kinerja sebesar 100% dibutuhkan realisasi anggaran sebesar 90,78% dan dikategorikan EFISIEN. Faktor pendorong tercapainya indikator ini adalah tersedianya dan terpeliharanya sarana prasarana serta tanaman di RTH.

Untuk pencapaian indikator Persentase sampah terkelola ketersediaan rasio efisiensi sebesar 1,01 yang berarti untuk pencapaian target kinerja sebesar 100,24% dibutuhkan realisasi anggaran sebesar 99,52% dan dikategorikan EFISIEN. Faktor pendorong tercapainya indikator ini adalah pembinaan para pelaku pengelola sampah (Bank Sampah, pemilah, dan pengirist sampah);

dan pengelolaan sampah secara *sanitary landfill*.

Untuk pencapaian indikator Persentase usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang terkelola dengan baik ketersediaan rasio efisiensi sebesar 1,09 yang berarti untuk pencapaian target kinerja sebesar 100,01% dibutuhkan realisasi anggaran sebesar 91,44% dan dikategorikan EFISIEN. Faktor pendorong tercapainya indikator ini adalah dengan melakukan pembinaan dan pemantauan yang dilakukan secara rutin kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3.

Untuk pencapaian indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah ketersediaan rasio efisiensi sebesar 0,99 yang berarti untuk pencapaian target kinerja sebesar 97,94% dibutuhkan realisasi anggaran sebesar 99,36% dan dikategorikan TIDAK EFISIEN. Kendala yang dihadapi adalah 1) target yang ditetapkan tidak menantang karena belum memperhatikan capaian periode sebelumnya. 2) Crosscutting yang dihasilkan belum terintegrasi dengan SOP. 3) Belum terdapat tindak lanjut dari rekomendasi yang diberikan dari hasil monitoring target jangka menengah. 4) Hasil revidi dokumen Renstra belum menunjukkan upaya perbaikan yang memuat inovasi program/kegiatan yang direncanakan. 5) Data kinerja yang dikumpulkan belum sepenuhnya lengkap. 6) Pengukuran kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi penyesuaian (refocusing) organisasi, strategi dan kebijakan dalam mencapai kinerja. 7) Belum seluruh unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja. 8) Penyajian informasi dalam laporan kinerja belum menjadi kepedulian seluruh pegawai. 9) Tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP belum dimanfaatkan secara optimal untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, serta perbaikan dan peningkatan kinerja. Sedangkan rencana tindak lanjutnya adalah 1) Menyesuaikan target kinerja pada Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan memperhatikan capaian tahun sebelumnya. 2) Menyusun SOP yang mengintegrasikan crosscutting di dalamnya. 3) Menyusun tindak lanjut rekomendasi monitoring pencapaian kinerja jangka menengah. 4) Menyusun Ranwal Renstra yang memuat inovasi yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah selama 5 (lima) tahun. 5) Memastikan data pembentuk indikator kinerja sudah terdokumentasi dengan baik dalam proses pengukuran kinerja. 6) Menyusun Rancangan LKjIP 2024 yang menginformasikan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya. 7) Bukti sosialisasi kepada seluruh unit/satuan kerja atas hasil pengukuran kinerja. 8) Bukti sosialisasi kepada seluruh pegawai tentang informasi pada LKjIP. 9) Bukti pemanfaatan hasil evaluasi akuntabilitas.

C. Prestasi / Penghargaan

Selama tahun 2024 prestasi / penghargaan yang diperoleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar adalah :

1. ADIPURA Ke-16 Kali Berturut-Turut (Tingkat Nasional)
2. PROKLIM (PROGRAM KAMPUNG IKLIM)

TINGKAT NASIONAL :

- Pembina Proklamasi Terbaik Tingkat Nasional
 - Walikota Blitar
- Proklamasi Kategori Lestari

- RW 09 Kelurahan Bendogerit
- Proklamasi Kategori Utama
 - RW 03 Kelurahan Rembang
 - RW 05 Kelurahan Klampok
 - RW 07 Kelurahan Karangtengah
- 3. ADIWIYATA (SEKOLAH PEDULI DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN)
TINGKAT NASIONAL :
 - Adiwiyata Mandiri
 - UPT Satuan Pendidikan SMPN 6 Kota Blitar
 - UPT Satuan Pendidikan SMPN 8 Kota Blitar
 - Adiwiyata Nasional
 - UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Tanjungsari
- 4. KELURAHAN BERSERI (BERSIH, SEHAT, DAN LESTARI)
TINGKAT PROVINSI :
 - Berseri Mandiri
 - Kelurahan Sananwetan
 - Kelurahan Tanggung
 - Kelurahan Ngadirejo
 - Berseri Madya
 - Kelurahan Gedog
 - Kelurahan Sentul
 - Kelurahan Karangtengah
 - Kelurahan Rembang
- 5. Terbaik I Penghargaan Kinarya Praja Pemerintah Kota Blitar

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2024 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar berdasar pada akuntabilitas. LKjIP juga disusun karena perannya sebagai alat kendali, penilai kualitas kerja dan sebagai pendorong perwujudan *Good Governance*. Dilain pihak, LKjIP juga merupakan media pertanggungjawaban kepada publik yang dapat digunakan sebagai alat introspeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab.

Dari analisis dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan yang telah di tetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar tahun 2024 dapat dikatakan berhasil walaupun masih dijumpai banyak kendala/hambatan dalam pelaksanaannya. Adapun capaian dari masing-masing kinerja utama diuraikan sebagai berikut :

1. Kinerja Utama Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan indikator kinerja Indeks kualitas air dari target 67,78 terealisasi 56,11, capaian sebesar 82,78%. Rendahnya capaian indeks kualitas air ini dikarenakan terdapat pencemaran dari industri, ternak, dan dari sektor domestik yang menyebabkan penurunan kualitas air sungai.
2. Kinerja Utama Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan indikator kinerja Indeks kualitas udara dari target 86,43 terealisasi 89,79, capaian sebesar 103,89%.
3. Kinerja Utama Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan indikator kinerja Indeks kualitas lahan dari target 56,23 terealisasi 34,13, capaian sebesar 60,70%. Rendahnya capaian indeks kualitas lahan ini dikarenakan adanya perubahan metode penilaian IKL (metode delineasi). Serta meningkatnya kebutuhan sarana dan prasarana kota sejalan dengan alih fungsi lahan, menyebabkan berkurangnya tutupan lahan di Kota Blitar.
4. Kinerja Utama Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan indikator kinerja Persentase capaian layanan persampahan dari target 97,78% terealisasi 98,01%, capaian sebesar 100,24%.
5. Kinerja Sasaran Meningkatnya lingkungan bersih dan hijau dengan indikator kinerja Persentase badan air yang memenuhi baku mutu dari target 85,00% terealisasi 27,22%, capaian sebesar 32,02%. Rendahnya capaian Persentase badan air yang memenuhi baku mutu ini dikarenakan terdapat Masih adanya pencemaran dari industri, ternak, dan dari sektor domestik yang menyebabkan penurunan kualitas air sungai.

6. Kinerja Sasaran Meningkatnya lingkungan bersih dan hijau dengan indikator kinerja Persentase kawasan yang memenuhi baku mutu udara (kawasan industri, pemukiman, perkantoran, dan transportasi) dari target 100,00% terealisasi 100,00%, capaian sebesar 100,00%.
7. Kinerja Sasaran Meningkatnya lingkungan bersih dan hijau dengan indikator kinerja Persentase RTH yang terkelola dari target 100,00% terealisasi 100,00%, capaian sebesar 100,00%.
8. Kinerja Sasaran Meningkatnya lingkungan bersih dan hijau dengan indikator kinerja Capaian layanan persampahan perkotaan dari target 97,78% terealisasi 98,01%, capaian sebesar 100,24%.
9. Kinerja Sasaran Meningkatnya lingkungan bersih dan hijau dengan indikator kinerja Persentase usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang terkelola dengan baik dari target 75,00% terealisasi 75,01%, capaian sebesar 100,01%.
10. Kinerja Sasaran Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah dari target 87,00 (A) terealisasi 85,05 (A), capaian sebesar 97,94%. Walaupun belum memenuhi target, namun nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 telah melampaui nilai daripada tahun 2023 yaitu 85,05.

B Langkah Perbaikan

Langkah perbaikan dalam LKjIP ini akan menjadi dasar perbaikan dokumen perencanaan tahunan dan menengah. Di masa mendatang dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi, strategi yang harus ditingkatkan adalah :

- a. Untuk meningkatkan nilai Indeks Kualitas Air, perlu dilakukan :
 1. Melakukan pembinaan dan monev terhadap pelaku usaha industri dan peternak yang diindikasikan menyebabkan terjadinya pencemaran air.
 2. Berkoordinasi dengan DPUPR sebagai OPD yang memiliki tupoksi atas pengelolaan limbah domestik.
- b. Untuk meningkatkan nilai Indeks Kualitas Udara, perlu dilakukan :
 1. Bekerja sama dengan Dishub untuk melaksanakan uji emisi kendaraan secara rutin.
 2. Pengadaan alat uji emisi transportasi.
 3. Mendorong pelaksanaan car free day secara rutin.
- c. Untuk meningkatkan nilai Indeks Kualitas Lahan, perlu dilakukan :
 1. Perhitungan IKL menggunakan citra satelit, diupayakan melaksanakan penanaman tanaman penghijauan menggunakan tanaman yang bertajuk lebar.

- d. Untuk meningkatkan capaian layanan persampahan, perlu dilakukan :
1. Optimalisasi pemanfaatan Cell 1 dan penataan lahan yang lebih efektif.
 2. Pembentukan kampung Zero Waste.

Demikian beberapa hal yang dapat disampaikan dalam LKjIP Dinas lingkungan hidup Kota Blitar semoga dapat memberikan kejelasan terhadap gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas lingkungan hidup Kota Blitar.

Blitar, 28 Februari 2025
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA BLITAR



II. AJUK INDIHARTATI

Pembina Utama Muda

NIP. 196612311993032047

PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA BLITAR



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. JAJUK INDIHARTATI
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. SANTOSO, M.Pd
Jabatan : Walikota Blitar
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Walikota Blitar,

Drs. SANTOSO, M.Pd

Blitar, 23 September 2024
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Blitar,

Ir. JAJUK INDIHARTATI
NIP. 196612311993032047

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA BLITAR

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	67.78(Indeks)
		Indeks kualitas udara	86.43(Indeks)
		Indeks kualitas lahan	56.23(Indeks)
		Persentase capaian layanan persampahan	97.78(Persen)
2	Meningkatnya lingkungan bersih dan hijau	Persentase badan air yang memenuhi baku mutu	85.00(Persen)
		Persentase kawasan yang memenuhi baku mutu udara (kawasan industri, pemukiman, perkantoran, dan transportasi)	100.00(%)
		Persentase RTH yang terkelola	100.00(%)
		Persentase sampah terkelola	97.78(Persen)
		Persentase usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang terkelola dengan baik	75.00(Persen)
3	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	87.00(Nilai)

No	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	11,052,180,095.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil,Insentif Fiskal,Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan
2	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	4,240,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	416,009,800.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum,Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
4	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	453,595,900.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum,Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	64,724,800.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
6	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	14,444,800.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	6,699,443,619.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum,Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil,Insentif Fiskal
8	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	477,668,350.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum,Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil,Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan
9	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	273,880,790.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

No	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6,494,345,016.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum,Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan
Total:		25,950,533,170.00	


Walikota Blitar,

Drs. SANTOSO, M.Pd

Blitar, 23 September 2024
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Blitar,

Ir. JAJUK INDIHARTATI
NIP. 196612311993032047

PERUBAHAN RENCANA KINERJA TAHUN 2024 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BLITAR

SASARAN			PROGRAM			SUB KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Meningkatnya lingkungan bersih dan hijau	Persentase badan air yang memenuhi baku mutu	85,00%	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase titik sampling badan air yang memenuhi baku mutu	56%	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 dokumen	152.070.000,00
			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kasus/aduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100%	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/ Ditangani	1 pengaduan	4.240.000,00
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pelaku usaha yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup	65%	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	12 dokumen	43.863.800,00
						Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	60 Badan Usaha	20.861.000,00
			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersedia	100%	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	2 dokumen	273.880.790,00
	Persentase kawasan yang memenuhi baku mutu udara (kawasan industri, pemukiman, perkantoran, dan transportasi)	100,00%	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO2eq)	8,95%	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 dokumen	325.598.350,00
				Persentase titik sampling udara ambien yang memenuhi baku mutu	100%				
	Persentase RTH yang terkelola	100,00%	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase luasan RTH publik terhadap luas wilayah kota	16,274%	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	14 unit	6.699.443.619,00
	Persentase sampah terkelola	97,78%	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase sampah tertangani	83,15%	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	3 kelompok	438.367.000,00

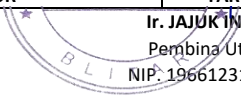
SASARAN			PROGRAM			SUB KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN
				Persentase sampah yang dikelola berbasis 3R	12,85%	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	11 unit	3.298.527.849,00
						Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	90 persen	7.315.285.246,00
			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase kelompok masyarakat peduli lingkungan yang dibina	100%	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	2 dokumen	221.947.400,00
						Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/k omunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	14 lembaga	231.648.500,00
			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase kelurahan berseri	50,79%	Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	5 entitas	416.009.800,00
				Persentase sekolah peduli dan berbudaya lingkungan (adiwiyata)	26,21%				
				Jumlah Predikat pengelolaan lingkungan hidup (adipura)	1 kali				
	Persentase usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang terkelola dengan baik	75,00%	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pelaku usaha yang memiliki izin penyimpanan limbah B3 sementara yang taat peraturan	100%	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	1 dokumen	14.444.800,00
Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	87,00 (A)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79,5 indeks	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	4.980.000,00
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan	4.465.600,00
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 orang/ bulan	5.398.525.868,00

SASARAN			PROGRAM			SUB KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	4 laporan	4.240.000,00
						Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 paket	37.300.000,00
						Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	69 orang	104.803.300,00
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	2.994.100,00
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	63.833.100,00
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 paket	4.523.700,00
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 paket	103.642.700,00
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	15.947.000,00
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 dokumen	6.720.000,00
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 laporan	241.651.648,00
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 laporan	68.067.600,00
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	26 laporan	270.062.000,00
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 unit	129.353.200,00
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80 unit	30.255.000,00
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	98 unit	2.980.200,00

Mengetahui,
**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA BLITAR**



SASARAN			PROGRAM			SUB KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN

 Ir. JAJUK INDIHARTATI
Pembina Utama Muda
NIP. 196612311993032047

PENGUKURAN KINERJA KEPALA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BLITAR
TAHUN 2024

Perangkat Daerah / Unit Kerja : Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar
Tahun : 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	TAHUN 2024		KET.	PROGRAM	PAGU Rp	TAHUN 2024		KET.
					REALISASI	%				REALISASI	%	
1	Meningkatnya lingkungan bersih dan hijau	Persentase badan air yang memenuhi baku mutu	Jumlah badan air yang memenuhi baku mutu ----- x 100% Jumlah badan air yang ditetapkan	85,00%	27,22%	32,02%		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	152.070.000,00	152.058.900,00	99,99%	
								Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	4.240.000,00	4.180.000,00	98,58%	
								Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	64.724.800,00	64.087.500,00	99,02%	
								Program Perencanaan Lingkungan Hidup	273.880.790,00	240.060.228,00	87,65%	
		Persentase kawasan yang memenuhi baku mutu udara (kawasan industri, pemukiman, perkantoran, dan transportasi)	Jumlah kawasan yang memenuhi baku mutu ----- x 100% Jumlah kawasan yang ditetapkan	100,00%	100,00%	100,00%		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	325.598.350,00	322.034.399,00	98,91%	
		Persentase RTH yang terkelola	((Luas RTH yang terkelola / Luas RTH yang ditetapkan) x 100%)	100,00%	100,00%	100,00%		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	6.699.443.619,00	6.082.037.357,00	90,78%	
		Persentase sampah terkelola	(Jumlah volume sampah terkelola / Jumlah timbunan sampah dalam satu tahun) x 100%	97,78%	98,01%	100,24%		Program Pengelolaan Persampahan	11.052.180.095,00	11.007.651.672,00	99,60%	
								Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	453.595.900,00	444.009.500,00	97,89%	
								Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	416.009.800,00	413.315.050,00	99,35%	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	TAHUN 2024		KET.	PROGRAM	PAGU Rp	TAHUN 2024		KET.
					REALISASI	%				REALISASI	%	
		Persentase usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang terkelola dengan baik	Jumlah usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang terkelola dengan baik ----- x 100% Jumlah usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang ditetapkan	75,00%	75,01%	100,01%		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	14.444.800,00	13.208.000,00	91,44%	
6	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	87,00 (A)	85,21 (A)	97,94%		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.494.345.016,00	6.453.009.701,00	99,36%	

Mengetahui,

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA BLITAR



Ir. JAJUK INDIHARTATI
Pembina Utama Muda
NIP. 196612311993032047

MATRIKS

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator
	Unsur Penunjang Urusan Lingkungan Hidup	
	Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas air
	Sasaran 1 : Meningkatnya lingkungan bersih dan hijau	Persentase badan air yang memenuhi baku mutu
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase titik sampling badan air yang memenuhi baku mutu
2.11.03.2.01	<i>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah aksi pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang terlaksana</i>
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kasus/aduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti
2.11.10.2.01	<i>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah kasus/aduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti</i>
2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pelaku usaha yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup
2.11.06.2.01	<i>Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah pelaku usaha yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup</i>
2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan

2.11.06.2.01 .0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersedia
2.11.02.2.0 1	<i>Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota</i>	<i>jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi</i>
2.11.02.2.01 .0006	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun
2.11.02.2.0 2	<i>Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD</i>	<i>Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun</i>
2.11.02.2.02 .0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun
		Indeks kualitas udara
		Persentase kawasan yang memenuhi baku mutu udara (kawasan industri, pemukiman, perkantoran, dan transportasi)
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase titik sampling udara ambien yang memenuhi baku mutu
		Persentase Penurunan Nilai Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO ₂ eq)
2.11.03.2.0 1	<i>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah titik sampling udara ambien yang memenuhi baku mutu</i>
		<i>Jumlah kegiatan dampak pengendalian perubahan iklim</i>
2.11.03.2.01 .0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan
		Indeks kualitas lahan
		Persentase RTH yang terkelola
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase luasan RTH publik terhadap luas wilayah kota
2.11.04.2.0 1	<i>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</i>	<i>Luas RTH Publik yang Terkelola</i>

2.11.04.2.01 .0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola
		Persentase capaian layanan persampahan
		Persentase sampah terkelola
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase sampah tertangani
		Persentase sampah yang dikelola berbasis 3R
2.11.11.2.0 1	<i>Pengelolaan Sampah</i>	<i>Volume sampah tertangani</i>
		<i>Volume sampah yang berkurang</i>
2.11.11.2.01 .0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat
2.11.11.2.01 .0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir
2.11.11.2.01 .0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan
2.11.11.2.01 .0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase kelompok masyarakat peduli lingkungan yang dibina
2.11.08.2.0 1	<i>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah kelompok masyarakat peduli lingkungan yang dibina</i>
2.11.08.2.01 .0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan
2.11.08.2.01 .0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH

2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase kelurahan berseri
		Persentase sekolah peduli dan berbudaya lingkungan (adiwiyata)
		Jumlah Predikat pengelolaan lingkungan hidup (adipura)
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah predikat kelurahan berseri yang diperoleh
		Jumlah predikat adiwiyata yang diperoleh
2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH
		Persentase ketaatan pelaku usaha penghasil limbah B3
		Persentase usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang terkelola dengan baik
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pelaku usaha yang memiliki izin penyimpanan limbah B3 sementara yang taat peraturan
2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang taat peraturan
2.11.05.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya
	Tujuan 2 : Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah
	Sasaran 2 : Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah
2.11.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

2.11.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar
2.11.01.2.01 .0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2.11.01.2.01 .0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2.11.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar
2.11.01.2.02 .0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
2.11.01.2.02 .0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
2.11.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar
2.11.01.2.05 .0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
2.11.01.2.05 .0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
2.11.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar
2.11.01.2.06 .0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

2.11.01.2.06 .0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
2.11.01.2.06 .0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
2.11.01.2.06 .0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
2.11.01.2.06 .0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
2.11.01.2.06 .0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
2.11.01.2.06 .0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.02.01.2.07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan</i>
1.02.01.2.07 .0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
1.02.01.2.07 .0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
1.02.01.2.07 .0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
2.11.01.2.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar</i>
2.11.01.2.08 .0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
2.11.01.2.08 .0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
2.11.01.2.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar</i>
2.11.01.2.09 .0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya

1.02.01.2.09 .0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara
2.11.01.2.09 .0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
1.02.01.2.09 .0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi
2.11.01.2.09 .0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

5 RENSTRA 2024

Formulasi Perhitungan / Definisi Operasional	Satuan	Target Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
		2024			
		K	Rp		
Nilai Indeks kualitas air (kalkulator)	Indeks	63,52			
(Jumlah badan air yang memenuhi baku mutu / jumlah badan air yang ditetapkan) x 100%	persen	85,00			
(Jumlah titik sampling badan air yang memenuhi baku mutu / Jumlah total titik sampling badan air) x 100%		56,00	1.289.000.000		
Jumlah aksi pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang terlaksana pada tahun berjalan	aksi	3	1.289.000.000		
Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut pada tahun berjalan	dokumen	1	1.289.000.000		
(Jumlah kasus/aduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti / Jumlah total kasus/aduan lingkungan hidup) x 100%	persen	100,00	50.000.000		
Jumlah kasus/aduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti pada tahun berjalan	kasus/aduan	1	50.000.000		
Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani pada tahun berjalan	pengaduan	1	50.000.000		
(Jumlah pelaku usaha yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup / Jumlah total pelaku usaha yang dipantau) x 100%	persen	65,00	210.854.400		
Jumlah pelaku usaha yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup pada tahun berjalan	usaha	60	210.854.400		
Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan pada tahun berjalan	dokumen	12	76.133.970		

Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi pada tahun berjalan	badan usaha	60	134.720.430		
(Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersedia / Jumlah total dokumen perencanaan lingkungan hidup) x 100%	persen	100	200.000.000		
<i>jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi pada tahun berjalan</i>	<i>dokumen</i>	<i>1</i>	<i>100.000.000</i>		
Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun pada tahun berjalan	dokumen	1	100.000.000		
<i>Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun pada tahun berjalan</i>	<i>dokumen</i>	<i>1</i>	<i>100.000.000</i>		
Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun pada tahun berjalan	dokumen	1	100.000.000		
Nilai Indeks kualitas udara (kalkulator)	Indeks	86,43			
(Jumlah kawasan yang memenuhi baku mutu / Jumlah kawasan yang ditetapkan) x 100%	persen	100			
(Jumlah titik sampling udara ambien yang memenuhi baku mutu / jumlah total titik sampling udara ambien yang dipantau) x 100%	persen	100	2.519.400.000		
((Nilai Proyeksi Emisi GRK - Nilai Emisi GRK hasil perhitungan http://signsmart.menlhk.go.id/)/Nilai Proyeksi Emisi GRK) x 100 %	persen	8,95			
<i>Jumlah titik sampling udara ambien yang memenuhi baku mutu pada tahun berjalan</i>	<i>titik</i>	<i>18</i>	<i>2.519.400.000</i>		
<i>Jumlah kegiatan dampak pengendalian perubahan iklim pada tahun berjalan</i>	<i>kali</i>	<i>3</i>			
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan pada tahun berjalan	dokumen	1	2.519.400.000		
Nilai Indeks kualitas lahan (kalkulator)	Indeks	56,23			
((Luas RTH yang terkelola / Luas RTH yang ditetapkan) x 100%)	persen	100			
Luas RTH Publik x 100% / Luas Wilayah Kota Blitar	persen	16,27	9.789.000.000		
<i>Luas RTH Publik yang Terkelola pada tahun berjalan</i>	<i>ha</i>	<i>420,34</i>	<i>9.789.000.000</i>		

Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola pada tahun berjalan	unit	14	9.789.000.000		
(Jumlah volume sampah terolah/jumlah total timbulan sampah x 100%)	persen	95,00			
(Jumlah volume sampah terkelola / Jumlah timbulan sampah dalam satu tahun) x 100%	persen	96,00			
((Volume sampah tertangani / timbulan sampah) x 100%)	persen	83,15	19.710.598.000		
((Volume sampah yang dikelola berbasis 3R / timbulan sampah) x 100%)	persen	12,85			
Volume sampah tertangani pada tahun berjalan	ton	22.808,21	19.710.598.000		
Volume sampah yang berkurang pada tahun berjalan	ton	3.680,54			
Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat pada tahun berjalan	kelompok	3	1.000.000.000		
Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir pada tahun berjalan	unit	11	11.690.598.000		
Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan pada tahun berjalan	dokumen	1	20.000.000		
(Luas jalan yang dilakukan penyapuan / Luas jalan di Kota Blitar) x 100%	persen	90	7.000.000.000		
((Jumlah kelompok masyarakat peduli lingkungan yang dibina / jumlah kelompok masyarakat peduli lingkungan di Kota Blitar) x 100%)	persen	100	600.000.000		
Jumlah kelompok masyarakat peduli lingkungan yang dibina pada tahun berjalan	kelompok	21	600.000.000		
Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan pada tahun berjalan	dokumen	3	250.000.000		
Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH pada tahun berjalan	lembaga	14	350.000.000		

((Jumlah predikat yang diperoleh / jumlah kelurahan x jumlah predikat yang seharusnya diperoleh (3 prestasi)) x 100%	persen	50,79	467.073.700		
((Jumlah predikat yang diperoleh / jumlah sekolah x jumlah predikat seharusnya (4 prestasi)) x 100%	persen	26,21			
Jumlah predikat yang didapat dalam satu tahun	kali	1			
Jumlah predikat kelurahan berseri yang diperoleh pada tahun berjalan	predikat	18	467.073.700		
Jumlah predikat adiwiyata yang diperoleh pada tahun berjalan	predikat	61			
Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH pada tahun berjalan	entitas	5	467.073.700		
(Jumlah pelaku usaha penghasil limbah B3 yang taat/Jumlah total pelaku usaha penghasil limbah B3) x 100%)	persen	72,00			
(Jumlah usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang terkelola dengan baik / Jumlah usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang ditetapkan) x 100%	Persen	75,00			
(Jumlah pelaku usaha yang memiliki izin penyimpanan limbah B3 sementara yang taat peraturan / Jumlah total pelaku usaha yang memiliki izin penyimpanan limbah B3 sementara yang dipantau) x 100%	persen	100	40.999.100		
Jumlah usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang taat peraturan pada tahun berjalan	usaha dan/atau kegiatan	45	40.999.100		
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	dokumen	1	40.999.100		
Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat	nilai	87 (A)			
Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat	nilai	87 (A)			
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun berjalan	nilai	79,5	8.231.229.966		

Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan PD yang tersusun tepat waktu dan sesuai standar ----- x 100% Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan PD yang harus disusun	<i>persen</i>	100	49.358.693		
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada tahun berjalan	dokumen	11	10.810.800		
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD pada tahun berjalan	laporan	7	38.547.893		
Jml administrasi keuangan perangkat daerah yang terlayani sesuai standar ----- x 100 % Jml administrasi keuangan perangkat daerah yang harus dilayani	<i>persen</i>	100	6.799.274.056		
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN pada tahun berjalan	orang	57	6.794.489.551		
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD pada tahun berjalan	laporan	4	4.784.505		
Jumlah jenis administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlayani sesuai standar ----- x 100% jumlah jenis administrasi kepegawaian perangkat daerah yang harus dilayani	<i>persen</i>	100	176.907.010		
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan pada tahun berjalan	paket	3	79.910.000		
Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan pada tahun berjalan	orang	69	96.997.010		
Jumlah jenis administrasi umum perangkat daerah yang tersedia sesuai standar ----- x 100% Jumlah jenis administrasi umum yang harus disediakan	<i>persen</i>	100	445.327.746		
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	paket	1	6.292.329		

Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	paket	6	56.220.398		
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan pada tahun berjalan	paket	4	7.090.950		
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	paket	21	73.593.800		
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan pada tahun berjalan	paket	1	27.684.029		
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan pada tahun berjalan	dokumen	36	8.448.000		
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat pada tahun berjalan Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada tahun berjalan	laporan	50	265.998.240		
Jumlah BMD penunjang urusan yang tersedia sesuai kebutuhan ----- x 100 %	persen	100	69.509.308		
Jumlah BMD penunjang urusan yang dibutuhkan					
Jumlah Paket Mebel yang Disediakan pada tahun berjalan	unit	6	15.806.519		
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan pada tahun berjalan	unit	7	53.702.789		
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan pada tahun berjalan	unit	0	0		
Jml penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia sesuai standar ----- x 100 %	persen	100	363.877.966		
Jml penunjang urusan pemerintahan yang harus disediakan					
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan pada tahun berjalan	laporan	36	72.157.966		
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	laporan	26	291.720.000		
Jumlah jenis BMD yang terpelihara ----- x 100%	persen	100	326.975.187		
jumlah jenis BMD yang harus dipelihara					
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya pada tahun berjalan	unit	39	119.264.450		

Jumlah Mebel yang Dipelihara pada tahun berjalan	unit	69	6.072.000		
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara pada tahun berjalan	unit	102	58.881.630		
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi pada tahun berjalan	unit	1	100.000.000		
Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi pada tahun berjalan	unit	425	42.757.107		